

---

## Menjaga Air, Menjaga Hidup: Kekuasaan, Pengetahuan, dan Agensi Perempuan Adat Sumba dalam Krisis Ekologi Kontemporer

Eva Solina Gultom<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

[evagultom@uho.ac.id](mailto:evagultom@uho.ac.id)

### *Abstract*

This study analyzes the representation of power and knowledge in the lives of indigenous women in Sumba through Michel Foucault's theoretical framework. By examining social practices, traditional rituals, and gender relations in three indigenous regions of East Sumba, West Sumba, and Central Sumba, this study seeks to reveal how the bodies and experiences of indigenous women become an arena where traditional power, state power, and economic power converge. Data was obtained from reports by institutions such as the Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN), the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), and Mongabay, as well as from secondary interviews with indigenous women leaders documented in official publications. The research method is descriptive qualitative with Foucaultian discourse analysis focusing on three layers of power: indigenous discourse and local morality, state regulations and development programs, and capital relations in the context of the tourism industry and land. The results of the analysis show that Sumba women are not merely objects of power, but subjects of knowledge who play an important role in ecological preservation and the reproduction of social values. The practices of land care, water management, and fertility rituals become spaces of resistance that challenge the dominance of masculine and colonial knowledge. This study emphasizes the importance of reading the experiences of indigenous women not only as part of gender issues, but as a form of epistemic resistance against the power structures that govern their lives. These findings are expected to enrich cultural studies, gender and the politics of knowledge in contemporary Indonesia.

**Keywords:** indigenous women; Sumba; Foucault; power-knowledge; resistance

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis representasi kuasa dan pengetahuan dalam kehidupan perempuan adat Sumba melalui kerangka teoretis Michel Foucault. Dengan menelusuri praktik sosial, ritual adat, dan relasi gender di tiga wilayah adat Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, studi ini berupaya mengungkap bagaimana tubuh dan pengalaman perempuan adat menjadi arena pertemuan antara kuasa tradisional, kuasa negara, dan kuasa ekonomi. Data diperoleh dari laporan lembaga seperti Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), Komnas Perempuan, dan Mongabay, serta hasil wawancara sekunder dengan tokoh perempuan adat yang terdokumentasi dalam publikasi resmi. Metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan analisis wacana Foucaultian yang berfokus pada tiga lapis kuasa: wacana adat dan moralitas lokal, regulasi negara dan

program pembangunan, serta relasi kapital dalam konteks industri pariwisata dan lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan Sumba bukan semata objek kuasa, melainkan subjek pengetahuan yang berperan penting dalam pelestarian ekologi dan reproduksi nilai-nilai sosial. Praktik perawatan tanah, pengelolaan air, serta ritual kesuburan menjadi ruang resistensi yang menantang dominasi pengetahuan maskulin dan kolonial. Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca pengalaman perempuan adat tidak hanya sebagai bagian dari isu gender, tetapi sebagai bentuk perlawanan epistemik terhadap struktur kuasa yang mengatur kehidupan mereka. Temuan ini diharapkan memperkaya kajian budaya, gender, dan politik pengetahuan di Indonesia kontemporer.

**Kata Kunci: perempuan adat; Sumba; Foucault; kuasa-pengetahuan; resistensi**

### **A. Pendahuluan**

Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu wilayah dengan sistem kebudayaan yang kuat berakar pada tradisi Marapu, sebuah kepercayaan lokal yang mengatur tatanan sosial, ritual, serta hubungan manusia dengan alam. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi yang kompleks. Di satu sisi berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi melalui praktik ritual dan pengetahuan tradisional, namun di sisi lain sering berada dalam posisi subordinat akibat konstruksi patriarki adat dan intervensi negara melalui kebijakan pembangunan modern. Dalam dekade terakhir, perubahan lanskap ekologis dan sosial di Sumba berlangsung cepat: proyek industri, perkebunan, dan pariwisata berkembang tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, khususnya perempuan. Kondisi ini menempatkan perempuan adat pada posisi yang paling rentan terhadap krisis air, kehilangan tanah, serta dislokasi kultural yang mengancam kesinambungan pengetahuan lokal mereka (Komnas Perempuan, 2023; Walhi, 2022).

Krisis ekologis yang dihadapi Sumba tidak hanya bersifat material, tetapi juga epistemologis. Ketika negara dan perusahaan mendefinisikan “pembangunan” sebagai bentuk kemajuan, maka cara pandang terhadap alam sebagai entitas sakral dan relasional yang diyakini dalam sistem Marapu, yaitu terpinggirkan. Dalam konteks inilah, analisis terhadap perempuan adat Sumba tidak dapat dilepaskan dari persoalan wacana (*discourse*). Sebagaimana dijelaskan oleh Foucault (1980), pengetahuan tidak netral, melainkan merupakan instrumen kuasa yang membentuk subjek. Kuasa bukan sekadar represif, tetapi produktif yang membentuk kebenaran, identitas, dan praktik sosial. Dengan demikian, ketika perempuan adat diatur oleh norma adat yang patriarkal di satu sisi, dan oleh kebijakan pembangunan negara di sisi lain, mereka sesungguhnya sedang berada di persimpangan dua rejim pengetahuan yang berupaya mendefinisikan siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperan.

Wacana pembangunan di Sumba pascareformasi banyak menekankan modernisasi melalui investasi. Pemerintah daerah, misalnya, mempromosikan Sumba sebagai “pulau hijau dan sejahtera” melalui proyek-proyek perkebunan tebu dan kelor yang diklaim ramah lingkungan. Namun, di balik retorika ekologis ini tersimpan praktik eksklusif. Laporan WALHI NTT (2022) menunjukkan bahwa ekspansi industri seperti PT Muria Sumba Manis (MSM) telah menutup akses terhadap sumber-sumber mata air yang selama ini digunakan komunitas adat, mengubah sistem pertanian subsisten menjadi buruh perkebunan, serta menghapus situs-situs ritual yang menjadi pusat kehidupan spiritual

perempuan. Dalam laporan itu, perempuan-perempuan dari komunitas Praipaha dan Mauliru menceritakan bahwa sungai yang dulunya menjadi tempat mereka mengambil air kini kering akibat irigasi untuk perkebunan industri. Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi juga bentuk *biopolitics*, yaitu cara kuasa mengatur kehidupan, menentukan siapa yang berhak hidup layak dan siapa yang dibiarkan dalam kekurangan (Foucault, 1978).

Relasi kuasa di Sumba memperlihatkan bahwa tubuh perempuan menjadi locus utama dari intervensi sosial dan politik. Praktik-praktik seperti “kawin tangkap”, yang sempat viral di Sumba Barat Daya, memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan diposisikan sebagai simbol adat yang harus dikontrol dan dinegosiasikan antara modernitas dan tradisi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dilegitimasi sebagai tradisi, sebab mencederai hak perempuan untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan (Antarnews, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bagaimana wacana adat dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mempertahankan dominasi laki-laki atas tubuh dan suara perempuan. Dalam kerangka Foucaultian, tubuh perempuan menjadi “medan politik” tempat berbagai kuasa bertemu adat, negara, dan kapital untuk mendisiplinkan dan menormalkan perilaku.

Di sisi lain, perempuan adat Sumba tidak pasif. Mereka menampilkan bentuk-bentuk agensi yang subtil namun signifikan. Dalam ritual Marapu, misalnya, perempuan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan kosmos melalui praktik menenun, menyimpan benih, dan mengatur ritus air. Kegiatan menenun bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan tindakan simbolik yang menyulam ulang ingatan ekologis dan sejarah komunitas mereka (Rambu, 2021). Dalam situasi ketika negara dan perusahaan mengambil alih sumber daya air dan lahan, praktik-praktik kultural ini menjadi bentuk resistensi kultural terhadap logika kapitalistik. Foucault (1979) menekankan bahwa di setiap relasi kuasa selalu ada ruang bagi resistensi. Perempuan adat menggunakan ruang ini untuk menegosiasikan posisi mereka, baik melalui strategi simbolik dalam ritual maupun melalui gerakan sosial berbasis komunitas yang menuntut pengakuan terhadap hak adat.

Penelitian tentang perempuan adat di Sumba telah dilakukan oleh sejumlah lembaga, namun sebagian besar fokus pada aspek sosial-ekonomi atau kekerasan berbasis gender. Belum banyak studi yang menelaah secara mendalam bagaimana relasi kuasa terbentuk melalui wacana pembangunan dan bagaimana perempuan adat menegosiasikan posisi mereka di dalamnya. Di sinilah kontribusi penelitian ini menjadi signifikan. Dengan menggunakan kerangka teori Foucault tentang power and knowledge dan biopolitics, penelitian ini berupaya mengungkap mekanisme-mekanisme kuasa yang bekerja di balik kebijakan pembangunan dan konstruksi sosial terhadap perempuan adat, sekaligus menelusuri ruang-ruang resistensi yang mereka ciptakan melalui praktik budaya dan pengetahuan lokal. Dalam konteks cultural studies, pendekatan ini penting karena menempatkan budaya bukan sekadar sistem makna, tetapi juga arena politik di mana makna diproduksi, dinegosiasikan, dan dilawan.

Selain itu, penelitian ini berupaya memperluas pemahaman tentang bagaimana perempuan adat memaknai “hidup” dalam konteks krisis ekologis yang sedang berlangsung. Ketika air mengering, tanah direklamasi, dan ritual tidak dapat lagi dijalankan secara utuh, perempuan adat bukan hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga kehilangan bagian dari identitas kultural mereka. Dengan demikian, isu lingkungan di Sumba tidak dapat dipisahkan dari persoalan eksistensial dan politik tubuh.

Melalui perspektif Foucault, tubuh perempuan dapat dibaca sebagai arsip kehidupan yang memuat jejak kuasa, resistensi, dan pengetahuan lokal. Pendekatan ini membantu menghindari penelitian dari jebakan romantisasi perempuan adat sebagai “penjaga alam” semata, dan justru menyoroiti kompleksitas posisi mereka dalam struktur kekuasaan yang saling berkelindan antara adat, negara, dan kapitalisme global.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengaitkan persoalan lokal Sumba dengan perdebatan teoritis global mengenai kuasa, pengetahuan, dan agensi. Dalam konteks Indonesia yang sedang gencar mendorong pembangunan berbasis investasi, analisis semacam ini menjadi relevan untuk menyoroiti bagaimana wacana “kemajuan” sering kali menutupi bentuk-bentuk kekerasan epistemik terhadap perempuan adat dan pengetahuan lokal mereka (Li, 2020). Dengan memahami bagaimana kuasa bekerja melalui wacana dan praktik kehidupan sehari-hari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih sensitif terhadap dimensi kultural dan gender, sekaligus memperkuat posisi perempuan adat sebagai subjek pengetahuan, bukan sekadar objek pembangunan.

Penulisan kutipan menggunakan in text citation (body note) sebagai berikut: (Kamba, 2018) atau (Marchlewska et al., 2019) atau (Cichocka, 2016; Hidayat & Khalika, 2019; Ikhwan, 2019; Madjid, 2002) atau (Miller & Josephs, 2009) atau Rakhmat (1989). Lihat bagian akhir panduan ini untuk informasi lebih detail. Simbol-simbol dan singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam artikel harus dijekaskan terlebih dahulu pada saat pertama kali disebutkan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif yang berlandaskan teori kuasa dan pengetahuan Michel Foucault. Tujuan utama penelitian ini bukan untuk mengukur besaran fenomena sosial, melainkan untuk memahami bagaimana relasi kuasa dan wacana membentuk posisi perempuan adat Sumba dalam konteks krisis ekologi. Dalam pandangan Foucault (1980), pengetahuan tidak pernah netral karena selalu terkait dengan kuasa yang memproduksi kebenaran dan membentuk subjek. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelusuri mekanisme-mekanisme kuasa yang beroperasi melalui praktik sosial, kebijakan pembangunan, dan konstruksi budaya terhadap perempuan adat di Sumba, serta untuk menafsirkan bagaimana mereka merespons dan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana Foucauldian, yang memusatkan perhatian pada bahasa, praktik, dan institusi sebagai arena di mana kuasa dan pengetahuan berkelindan. Analisis wacana dalam kerangka Foucault tidak dimaksudkan untuk menemukan makna tunggal atau “kebenaran” objektif, melainkan untuk menelusuri bagaimana kebenaran itu dikonstruksi, disebarkan, dan dilegitimasi melalui praktik diskursif (Arribas-Ayllon & Walkerdine, 2017). Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi relasi kuasa yang tersembunyi dalam wacana pembangunan dan adat, serta membaca strategi resistensi perempuan adat yang muncul sebagai bentuk produksi pengetahuan alternatif.

Data penelitian dikumpulkan secara kualitatif melalui telaah dokumen dan sumber sekunder yang kredibel. Sumber-sumber utama mencakup laporan lembaga nasional dan internasional seperti Komnas Perempuan (2023), WALHI NTT (2022), dan Konsorsium

Pembaruan Agraria (2023), yang menyoroti dampak sosial-ekologis pembangunan di Sumba. Selain itu, digunakan pula laporan lapangan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2022) yang mendokumentasikan pengalaman perempuan adat dalam menjaga sumber air dan lahan, serta liputan investigatif media seperti *Mongabay Indonesia* (2023) dan *Tempo* (2024) mengenai konflik agraria dan degradasi lingkungan. Untuk memperkuat dimensi kultural, penelitian ini juga mengacu pada tulisan etnografis dan studi akademik yang menelusuri peran perempuan dalam sistem Marapu dan pengetahuan ekologi tradisional (Rambu, 2021; Haba, 2020). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap isu gender, adat, dan ekologi.

Analisis data dilakukan melalui pembacaan kritis dan hermeneutik terhadap teks-teks yang dikumpulkan. Setiap dokumen, baik laporan maupun pernyataan publik, dibaca sebagai praktik diskursif yang membentuk realitas sosial, bukan sekadar merepresentasikannya. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap yang berjalan simultan: mengidentifikasi konstruksi wacana tentang perempuan adat dan alam; memetakan relasi kuasa yang muncul dari interaksi antara adat, negara, dan kapital; serta menafsirkan bentuk-bentuk agensi perempuan dalam menghadapi struktur kuasa tersebut. Dalam konteks ini, istilah-istilah seperti “pembangunan berkelanjutan”, “kearifan lokal”, atau “pemberdayaan perempuan” diperlakukan sebagai simpul wacana (*node points*) yang mengandung berbagai kepentingan politik dan ideologis (Hall, 1997). Melalui pembacaan semacam ini, analisis berupaya mengungkap siapa yang diberi hak untuk berbicara, siapa yang disenyapkan, dan bagaimana suara perempuan adat dinegosiasikan di dalam struktur kuasa yang lebih luas.

Peneliti menyadari bahwa posisi dirinya tidak netral. Dalam perspektif Foucault, peneliti selalu menjadi bagian dari jaringan kuasa dan pengetahuan yang sedang diteliti (Foucault, 1978). Oleh karena itu, reflektivitas menjadi bagian penting dalam proses analisis. Kesadaran akan posisi sosial, epistemologis, dan kultural peneliti digunakan untuk menghindari reproduksi wacana kolonial atau patriarkal yang justru ingin dikritisi. Peneliti menempatkan diri sebagai pembaca kritis yang berupaya memahami suara perempuan adat sebagaimana mereka mengartikulasikannya, bukan sekadar sebagai objek representasi.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber. Data dari laporan lembaga masyarakat sipil dibandingkan dengan temuan media independen serta publikasi akademik, sehingga memungkinkan verifikasi narasi dan pengujian konsistensi antar-sumber. Validitas teoritis dijaga melalui pembacaan mendalam terhadap karya utama Foucault, antara lain *The History of Sexuality* (1978), *Discipline and Punish* (1979), dan *Power/Knowledge* (1980), agar penerapan konsep kuasa, pengetahuan, dan resistensi tetap konsisten secara epistemologis.

Penelitian ini memiliki batasan karena tidak melibatkan wawancara lapangan secara langsung. Namun, fokus analisis pada dokumen publik justru memberikan keunggulan konseptual, karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap representasi dan wacana yang membentuk persepsi sosial tentang perempuan adat Sumba. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami bagaimana kuasa bekerja melalui bahasa, kebijakan, dan media, serta bagaimana perempuan adat meresponsnya melalui

praktik budaya dan pengetahuan lokal mereka. Penelitian ini dengan demikian tidak bertujuan untuk generalisasi empiris, tetapi untuk menghasilkan pemahaman konseptual tentang bagaimana perempuan adat Sumba membentuk makna hidup, tubuh, dan alam di tengah tumpang tindih antara adat, negara, dan kapitalisme global.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### Kuasa Adat dan Produksi Pengetahuan Lokal

Dalam masyarakat adat Sumba, relasi antara manusia, alam, dan leluhur diatur melalui sistem kepercayaan *Marapu*, sebuah kosmologi yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip moral tertinggi. *Marapu* tidak hanya memuat keyakinan religius, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengetahuan yang menentukan bagaimana masyarakat memahami tubuh, tanah, dan relasi sosial. Perempuan adat berada di jantung sistem ini, karena mereka dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan unsur alam, terutama tanah dan air, yang melambangkan kesuburan (Rambu, 2021). Namun, posisi ini bersifat ambivalen: perempuan dihormati karena kekuatannya melahirkan kehidupan, tetapi pada saat yang sama dikekang oleh struktur adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas publik dan ritual.

Foucault (1980) menyatakan bahwa kuasa tidak sekadar menindas, tetapi juga memproduksi subjek melalui praktik pengetahuan yang diterima sebagai kebenaran. Dalam konteks Sumba, *Marapu* berfungsi sebagai *regime of truth*, yaitu sebuah tatanan diskursif yang menentukan apa yang dianggap benar tentang peran dan batas perempuan. Perempuan yang menaati norma kesopanan adat, misalnya, disebut sebagai “induk tenun” atau “penjaga rumah”, kategori yang menandakan kehormatan tetapi juga kepatuhan. Melalui mekanisme ini, tubuh perempuan didisiplinkan secara halus agar selalu tunduk pada struktur sosial yang maskulin. Ritual, bahasa adat, dan aturan perkawinan menjadi alat yang mereproduksi tatanan kuasa melalui simbol dan praktik sehari-hari.

Namun, kuasa adat tidak bisa disederhanakan sebagai penindasan semata. Dalam praktik sosial, banyak perempuan adat memanfaatkan ruang yang disediakan oleh sistem *Marapu* untuk memperoleh bentuk kuasa simbolik. Pengetahuan tentang doa ritual, pengobatan tradisional, dan pengelolaan tanah sering kali dimonopoli oleh perempuan tua yang dianggap “bersih secara spiritual” (Haba, 2020). Mereka berperan sebagai penafsir pesan leluhur dan penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Dalam konteks Foucauldian, posisi ini dapat dibaca sebagai *productive power*, kuasa yang menghasilkan peran sosial dan memungkinkan resistensi di dalamnya (Foucault, 1978). Pengetahuan spiritual menjadi sumber legitimasi yang membuat perempuan berpengaruh dalam komunitas, meskipun tidak selalu dalam posisi formal.

Penelitian lapangan yang dilakukan AMAN (2022) menunjukkan bahwa dalam banyak kampung di Sumba Timur dan Barat, keputusan terkait lahan atau ritual tidak dapat dijalankan tanpa restu perempuan yang memiliki otoritas adat. Ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya objek dari struktur kuasa, tetapi juga agen yang mampu memelihara dan menafsirkan ulang tradisi. Dalam upacara *pahomba* misalnya ritual persembahan untuk kesuburan tanah, perempuan bertugas mempersiapkan sesajen dan menenun kain sakral yang diyakini sebagai penghubung antara dunia roh dan manusia. Aktivitas ini bersifat simbolik sekaligus epistemologis yang menciptakan dan mewariskan pengetahuan yang memastikan kontinuitas sistem nilai adat. Dengan demikian, dalam lapisan pertama ini, kuasa adat bekerja melalui mekanisme pengetahuan yang mendefinisikan peran perempuan, tetapi juga membuka kemungkinan resistensi melalui spiritualitas dan simbol.

## Kuasa Negara dan Kapital

Memasuki dekade terakhir, Sumba menjadi salah satu wilayah yang paling gencar dikembangkan oleh negara melalui wacana “pariwisata berkelanjutan” dan “pembangunan hijau”. Namun di balik narasi kemajuan ini tersembunyi logika kuasa yang baru: kuasa birokrasi dan kapitalisme yang menata ulang ruang, sumber daya, dan bahkan makna adat. Negara menghadirkan dirinya sebagai pelindung perempuan adat melalui program pemberdayaan, tetapi pada saat yang sama mengatur bagaimana mereka seharusnya hidup, bekerja, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Foucault (1991) menyebut proses ini sebagai *governmentality*, suatu mekanisme pengaturan populasi melalui pembentukan subjek yang patuh, bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui wacana dan kebijakan. Dalam berbagai dokumen kebijakan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT, 2021–2024), perempuan adat Sumba digambarkan sebagai “penggerak ekonomi kreatif” yang potensial melalui industri tenun, pariwisata, dan kerajinan tangan. Frasa seperti “mengintegrasikan perempuan adat ke dalam rantai nilai global” menunjukkan bahwa pemberdayaan diartikan dalam kerangka kapitalistik. Padahal, konsep ini sering mengabaikan kenyataan bahwa sebagian besar perempuan adat tidak memiliki akses terhadap lahan, modal, dan pendidikan formal (Komnas Perempuan, 2023). Ketika proyek pembangunan jalan, hotel, atau peternakan besar masuk, lahan komunal sering diklaim sebagai milik negara, dan perempuan kehilangan sumber penghidupan tradisional seperti air, hutan, dan padang rumput (Walhi NTT, 2022).

Di sinilah kuasa pengetahuan modern bekerja: negara menciptakan “kebenaran” baru tentang tanah sebagai *aset ekonomi*, bukan sebagai entitas hidup yang dijaga oleh ritual leluhur. Bahasa kebijakan yang teknokratik, seperti “optimalisasi lahan” atau “pembangunan kawasan strategis nasional”, berfungsi menyingkirkan bahasa adat yang spiritual dan relasional. Dalam logika Foucauldian, ini adalah bentuk *epistemic violence* yang menundukkan pengetahuan lokal di bawah rasionalitas modern (Foucault, 1980). Perempuan adat menjadi subjek yang diatur: mereka dilatih untuk menjadi produktif dalam ekonomi pasar, bukan dalam menjaga keseimbangan ekologi yang selama ini menjadi inti kehidupan mereka.

Selain itu, kapitalisme pariwisata mengonstruksi tubuh perempuan adat sebagai komoditas visual. Dalam promosi resmi pariwisata, perempuan Sumba sering ditampilkan dalam pose menenun, menari, atau membawa hasil panen, suatu citra yang indah tetapi menutupi realitas kerja keras dan ketimpangan (Tempo, 2024). Tubuh perempuan menjadi situs disiplin, sebagaimana dikatakan Foucault (1979) dalam *Discipline and Punish*: tubuh diatur agar tampil sesuai norma estetika tertentu yang diinginkan oleh ekonomi dan moralitas publik. Dalam konteks ini, “tradisi” menjadi instrumen kuasa, bukan untuk melestarikan identitas, tetapi untuk memperindah wajah kapitalisme. Lebih jauh, proyek pembangunan dan pariwisata juga memperkuat patriarki birokratis. Banyak program pelatihan bagi perempuan adat difokuskan pada keterampilan domestik seperti memasak, merajut, atau pelayanan wisata, bukan pada hak tanah atau kepemimpinan komunitas (Mongabay Indonesia, 2023). Dengan demikian, wacana pembangunan menciptakan subjek perempuan yang “berdaya” dalam pengertian yang dikontrol oleh negara: patuh, produktif, dan estetis. Ini menegaskan tesis Foucault (1980) bahwa kuasa modern bekerja bukan dengan melarang, tetapi dengan memproduksi jenis subjek tertentu yang sesuai dengan kebutuhan rezim.

Namun, penting dicatat bahwa kuasa negara dan kapital tidak sepenuhnya menghapus kuasa adat; keduanya justru sering berkolaborasi. Dalam beberapa kasus, elit adat laki-laki menjadi mediator proyek pembangunan dan menerima kompensasi tanah

tanpa melibatkan perempuan (AMAN, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa patriarki adat dan kapitalisme global saling menopang. Adat digunakan sebagai legitimasi moral untuk proyek negara, sementara negara memberi ruang simbolik bagi adat untuk bertahan dalam bentuk yang sudah dimodifikasi. Maka, dalam lapisan kedua ini, kita melihat bagaimana wacana pembangunan menciptakan bentuk kuasa yang bekerja melalui integrasi: menundukkan pengetahuan lokal melalui narasi kemajuan, sambil menampilkan perempuan adat sebagai ikon budaya yang “diberdayakan”.

### **Agensi dan Resistensi Perempuan Adat**

Di tengah jaringan kuasa yang menindas dan produktif tersebut, perempuan adat Sumba tidak pasif. Mereka mengembangkan berbagai bentuk resistensi yang berakar pada pengetahuan lokal, solidaritas sosial, dan spiritualitas. Dalam kerangka Foucault (1982), resistensi tidak selalu muncul dalam bentuk konfrontatif, melainkan melalui *counter-conduct*, suatu tindakan yang menolak cara pengaturan diri yang diciptakan oleh rezim kuasa. Perempuan adat Sumba melakukannya dengan mengubah praktik budaya menjadi ruang negosiasi dan produksi makna baru.

Salah satu bentuk resistensi yang paling menonjol adalah penguatan jaringan ekonomi solidaritas berbasis tenun. Komunitas perempuan di Waingapu dan Prailiu membangun sistem pemasaran kolektif untuk menghindari tengkulak pariwisata dan memulihkan kontrol atas nilai budaya tenun mereka (Rambu & Kaleka, 2023). Tenun dalam konteks ini bukan hanya artefak ekonomi, tetapi teks budaya yang menyimpan pengetahuan ekologis dan spiritual. Pola-pola pada kain sering melambangkan air, pohon, dan binatang leluhur, simbol yang menegaskan hubungan perempuan dengan alam. Dengan menjadikan tenun sebagai ruang pengetahuan alternatif, perempuan adat mengubah produk yang semula dikomodifikasi menjadi alat afirmasi identitas dan kemandirian. Ini merupakan contoh bagaimana *subjugated knowledge* (Foucault, 1980) yang sebelumnya ditekan kini muncul kembali sebagai bentuk kebenaran yang menantang rasionalitas kapitalistik.

Resistensi juga tampak dalam gerakan menjaga sumber air dan tanah. Di beberapa wilayah seperti Mahu dan Lamboya, perempuan adat memimpin aksi kolektif menolak proyek pengeboran air dan pembukaan lahan peternakan skala besar. Mereka menegaskan bahwa air bukan hanya sumber ekonomi, melainkan bagian dari tubuh sosial dan spiritual mereka (Walhi NTT, 2022). Dalam aksi-aksi tersebut, perempuan membawa simbol-simbol ritual seperti daun sirih dan kain tenun sebagai tanda kesucian tanah. Simbol-simbol ini bukan sekadar ekspresi keagamaan, tetapi bentuk epistemologis yang menolak dikotomi antara spiritual dan material, sebuah cara berpikir yang menantang “kebenaran” ilmiah modern. Di sinilah perempuan adat menciptakan *regime of truth* mereka sendiri, di mana pengetahuan ekologis, tubuh, dan spiritualitas menjadi satu kesatuan.

Selain bentuk resistensi langsung, banyak perempuan adat menggunakan jalur diskursif dengan memanfaatkan ruang yang disediakan negara. Dalam festival budaya atau kegiatan pariwisata, mereka sering menampilkan ritual *wulla poddu*, bulan suci dalam tradisi Marapu, dengan makna baru sebagai peringatan ekologis (Mongabay Indonesia, 2024). Dengan demikian, simbol adat digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Strategi ini sejalan dengan pandangan Foucault (1982) bahwa resistensi dapat muncul di dalam sistem, melalui reinterpretasi dan repolitisasi simbol-simbol yang ada.

Perempuan adat juga mulai mengartikulasikan pengalaman mereka melalui media digital. Beberapa kelompok muda Sumba menggunakan platform media sosial untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional dan kisah perjuangan perempuan adat.

Praktik ini menciptakan ruang baru bagi *counter-discourse*, wacana tandingan yang menantang representasi stereotip tentang perempuan sebagai “objek budaya”. Di ruang digital, mereka tidak lagi hanya “dilihat”, tetapi juga “berbicara”. Dengan demikian, resistensi tidak lagi terbatas pada ritual atau aksi fisik, melainkan juga melalui produksi pengetahuan dan narasi.

Lapisan ketiga ini memperlihatkan bahwa resistensi perempuan adat Sumba adalah bentuk *subjectivation*: proses menjadi subjek yang sadar dan aktif dalam menentukan makna hidupnya sendiri (Foucault, 1983). Melalui praktik budaya, spiritualitas, dan solidaritas sosial, mereka menolak posisi pasif yang diciptakan oleh adat, negara, dan kapitalisme. Mereka tidak hanya melawan, tetapi juga membangun dunia alternatif yang berakar pada pengetahuan lokal dan hubungan ekologis yang egaliter. Dalam konteks ini, resistensi bukanlah akhir dari kuasa, tetapi bagian dari siklusnya, sebuah upaya berkelanjutan untuk menegosiasikan ruang kebebasan dalam tatanan yang terus berubah.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa pengalaman perempuan adat Sumba dalam menghadapi krisis ekologi dan tekanan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari jaringan kuasa yang saling berkelindan antara adat, negara, dan kapital. Dengan kerangka Michel Foucault, relasi kuasa dipahami bukan sebagai kekuasaan tunggal yang menindas, tetapi sebagai mekanisme yang tersebar dan produktif membentuk pengetahuan, perilaku, serta identitas perempuan adat. Dalam konteks Sumba, tubuh perempuan dan pengetahuan lokal mereka menjadi arena di mana kuasa dijalankan sekaligus dilawan.

Pada lapisan adat, norma dan ritus tradisional berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang mengatur tubuh, peran, dan perilaku perempuan. Mereka dituntut menjaga harmoni sosial melalui ritual dan kerja reproduktif, namun pembatasan tersebut juga membuka ruang negosiasi. Sejumlah perempuan muda kini mulai menafsir ulang tradisi dengan menggabungkan nilai adat dan praktik ekologis baru, memperlihatkan bahwa resistensi dapat muncul dari dalam sistem adat itu sendiri.

Kuasa negara hadir melalui wacana pembangunan yang menjanjikan kemajuan, tetapi sering menyingkirkan pengetahuan lokal. Kebijakan tanah dan proyek pariwisata mengatur siapa yang berhak atas alam dan sumber daya, menjadikan perempuan adat kelompok yang paling rentan. Namun, mereka merespons dengan membangun komunitas dan jaringan advokasi untuk mempertahankan hak atas tanah dan air, bentuk *governmentality* yang menandakan agensi dalam struktur kuasa. Sementara itu, kapital bekerja melalui komodifikasi tubuh dan budaya perempuan adat. Industri pariwisata menggambarkan mereka sebagai simbol eksotisme, tetapi beberapa perempuan memanfaatkan ruang digital untuk menegosiasikan representasi diri dan memperoleh otonomi ekonomi. Dalam kerangka Foucault, praktik ini merupakan bentuk *counter-discourse* yang menunjukkan kemampuan subjek lokal menciptakan makna baru di tengah hegemoni pasar global.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep kuasa dan pengetahuan Foucault tetap relevan untuk membaca dinamika masyarakat adat di Indonesia. Secara praktis, hasil kajian ini menegaskan pentingnya mengakui pengetahuan ekologis perempuan adat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga non-negara perlu melibatkan mereka bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai penghasil pengetahuan dan penjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, keberadaan perempuan adat Sumba bukan hanya simbol tradisi, melainkan kekuatan sosial yang aktif dalam menata ulang relasi kuasa dan pengetahuan di tanah mereka sendiri.

## Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (2021). *Gender and green governance: The political economy of women's presence within and beyond community forestry*. Oxford University Press.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2022). *Laporan tahunan AMAN 2022: Perempuan adat dalam pusaran krisis iklim dan pembangunan nasional*. AMAN Publishing.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2023). *Perempuan adat dan ruang hidup: Catatan advokasi komunitas perempuan adat di Nusa Tenggara Timur*. AMAN Press.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2024). *Menuju pengakuan penuh masyarakat adat: Agenda politik dan gender 2024–2030*. AMAN National Secretariat.
- Amnesty International Indonesia. (2021). *Indonesia: Women environmental defenders under threat*. Amnesty International Report.
- Arivia, G., & Subono, N. I. (2022). Feminisme dan keadilan ekologis di Indonesia: Perspektif interdisipliner. *Jurnal Perempuan*, 27(2), 55–70.
- Butler, J. (2020). *The force of nonviolence: An ethico-political bind*. Verso.
- Dewi, N. (2022). Women, water, and resistance: Ecofeminism and the politics of survival in Eastern Indonesia. *Asian Journal of Women's Studies*, 28(3), 299–318.
- Foucault, M. (2020). *Power: The essential works of Michel Foucault, 1954–1984, Vol. 3*. Penguin.
- Gultom, E. (2023). The Sustainable Tourism of Lumban Suhi–Suhi Village Samosir after The Pandemic. *Humaniora*, 35(1), 24-32. /\*doi:<http://dx.doi.org/10.22146/jh.80315>\*/ doi:<https://doi.org/10.22146/jh.80315>
- Gultom, E. S. (2024). Dinamika perempuan Batak Toba dalam pelestarian hutan melalui perspektif ekofeminisme. *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 1–16.
- Gultom, E. S. (2025). Portrait of Women in Palito Ni Si Boru Toba Novel. *HUELE: Journal of Applied Linguistics, Literature and Culture*, 5(1), 16-30.
- Gultom, E. (2025). The Symbolic Capital of Ulos Amongst Christians (A Perspective of Bourdieu in Social Media Users). (2025). *ELITE: Journal of English Language and Literature*, 10(1), 11-23. <https://doi.org/10.33772/yynfg204>
- Harcourt, W., & Nelson, I. L. (2022). *Practicing feminist political ecologies: Moving beyond the “green economy.”* Routledge.
- Hidayat, R., & Wahyudi, S. (2023). Women, land, and customary law in Eastern Indonesia: Negotiating gendered spaces in adat society. *Humaniora*, 35(1), 15–28.
- Komnas Perempuan. (2022). *Perempuan adat dan krisis ekologis: Laporan tahunan 2022*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Li, T. M. (2020). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.

- Manafe, M. W. N., Yodiansyah, H., Turyadi, I., Kraugusteeliana, K., & Gultom, E. S. (2023). Introduction of cultural potential in supporting local tourism growth in the southwest Sumba region through web-based information media. *Mantik*, 7(1), 284–292.  
<https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/download/3729/2715/13172>
- Mongabay Indonesia. (2023, May 14). Perempuan Sumba menghadapi krisis air dan ancaman tambang batu gamping. <https://www.mongabay.co.id>
- Mosse, D. (2021). *The anthropology of development and the challenge of indigenous modernities*. Routledge.
- Parker, L., & Nilan, P. (2021). *Adat and the state: Cultural politics in contemporary Indonesia*. Springer.
- Rocheleau, D., & Roth, R. (2020). Rooted networks, relational webs and powers of connection: Rethinking human and political ecologies. *Geoforum*, 108, 204–214.
- Sahlins, M. (2020). *The original political society*. HAU Books.
- Sihombing, D. (2021). Negotiating gender and adat in Eastern Indonesia: A case study of women's participation in customary decision-making. *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, 22(3), 321–345.
- Sumba Alliance for Environmental Justice (SAEJ). (2023). *Laporan advokasi perempuan adat dalam pengelolaan air dan tanah di Sumba*. Sumba Alliance Publication.
- Tsing, A. L. (2020). *The mushroom at the end of the world: On the possibility of life in capitalist ruins*. Princeton University Press.
- UN Women Indonesia. (2021). *Voices of indigenous women: Gender equality and sustainable development in Indonesia*. UN Women Report.
- WALHI Nusa Tenggara Timur. (2024). *Perempuan penjaga air: Laporan ekologi dan resistensi perempuan adat Sumba*. WALHI Regional Report.
- Widyawati, I., & Sari, A. P. (2023). Gendered ecologies and indigenous resilience: A case from Eastern Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 51(150), 248–266.